Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung Tahun 2000-2017

Number of Population, GDP and Regional Expenditure on Local Own-source Revenue (PAD) in Bandung Regency Year 2000-2017

[1]Idham Nur Iman,[2]Ima Amaliah,[3]Meidy Haviz

[1,2,3]Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: [1]idhamnuriman19@gmail.com, [2]amalia.razi@gmail.com, [3]meidyhaviz@gmail.com

Abstract. Local Own-source Revenue (PAD) is the income that is obtained by the region which is collected based on regional regulations in accordance with statutory regulations. The components in the PAD such as local taxes, charges, the results of managed wealth and other legitimate income. Bandung Regency is one of the regions with high PAD revenue potential because it is seen from the population, GDP and regional expenditure that are quite large, however, it is not followed by the amount of revenue from the Regional Original Revenue. The purpose of this research to analyze how the effect and magnitude of the effect of the variable population, GDP and regional expenditure on PAD in Bandung Regency. This type of research is quantitative research. The data used are secondary data sourced from BPS Bandung Regency, using coherent data (Time Series). Deception is assisted by using the eviews-7 program with the Ordinary Least Square (OLS) method. The results showed simultaneously variables of population, GDP and regional expenditure together influence PAD. Partially, the amount of population, GDP and regional expenditure respectively affect PAD. The estimation results obtained by R2 are 98.33% and the remaining 1.67% is explained by variables not disclosed in the study. The suggestion for the government is to optimize the online system and efficiency in parking tax collection.

Keywords: PAD, Number of Population, GDP, Regional Expenditure.

Abstrak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun komponen dalam PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan yang dikelola dan lain-lain pendapatan yang sah. Kabupaten Bandung merupakan salah satu wilayah dengan potensi penerimaan PAD yang tinggi karena dilihat dari jumlah penduduk, PDRB dan belanja daerah yang cukup besar namun, tidak diikuti dengan besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh dan besarnya pengaruh variabel jumlah penduduk, PDRB dan belanja daerah terhadap PAD di Kabupaten Bandung. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari BPS Kabupaten Bandung, menggunakan data runtut (Time Series). Pengelohan dibantu dengan menggunakan program eviews-7 dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan secara simultan variabel jumlah penduduk, PDRB dan belanja daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD. Secara Parsial varibel jumlah penduduk, PDRB dan belanja daerah secara masing-masing berpengaruh terhadap PAD. Hasil estimasi diperoleh R^2 adalah sebesar 98,33% sisanya sebesar 1,67% dijelaskan oleh variabel-variabel yang tidak diungkapkan dalam penelitian. Adapun saran untuk pemerintah yaitu mengotimalkan sistem online dan efisiensi dalam pemungutan pajak parkir.

Kata Kunci: PAD, Jumlah Penduduk, PDRB, Belanja Daerah.

A. Pendahuluan

Ada tiga prinsip dalam otonomi daerah menurut Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, bentuk otonomo dalam hal fiskal adalah masing-masing daerah pasti memiliki anggaran tersendiri yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat menjadi APBD. Ada lima Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki PAD terbesar yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi,

Kabupaten Kawarang, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sukabumi.

Kabupaten Bandung memiliki potensi yang besar dalam sumber penerimaan PAD. Sehingga penelitian ini difokuskan ke Kabupaten Bandung dengan tujuan untuk menggali berbagai potensi yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Dengan demikian Kabupaten Bandung bisa meningkatkan PADnya secara signifikan.

Jika dilhat dari kontribusi terhadap APBD di Kabupaten Bandung PAD menyumbang rata-rata sebesar 16,66%, dana perimbangan sebesar 55,51% dan lain-lain pendapatan sebesar 19,36%. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Bandung masih ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Menurut Simanjuntak (2002) menyatakan bahwa semakin besar kontribusi PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Sebaliknya jika semakin rendah kontribusi PAD dalam APBD maka semakin besar ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, sehingga peran pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran ke daerah dalam rangka pelaksanan otonomi daerah cenderung lebih dominan Menurut Purnomo (2009) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengutip dari hasil penelitian Sari, dkk. (2016) bahwa ada faktor yang mempengaruhi PAD yaitu jumlah penduduk dan PDRB. Jumlah penduduk merupakan sejumlah orang yang bertempat tinggal disuatu daerah. Semakin banyaknya jumlah penduduk maka akan banyak aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Efeknya akan menciptakan multiplier bagi barang dan jasa, begitu juga dengan perekonomian seluruhnya. Selanjutnya tumbuhnya sektor-sektor ekonomi lainnya yang berefek pada banyaknya sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan PAD yang bersumber dari pajak usaha dan pajak perorangan. Berikut tabel 1.1 jumlah penduduk, PDRB dan belanja daerah di Kabupaten Bandung tahun 2015-2017.

Tabel 1. Jumlah Penduduk, PDRB, dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015-2017

	Tahun		
	2015	**2016**	**2017**
Pendapatan Asli Daerah	784.216.215.220	856.514.244.254	858.875.587.180
Jumlah Penduduk	3.534.111	3.596.623	3.657.701
PDRB	64.701.521,60	68.804.850,80	73.039.453.,80
Belanja Daerah	5.148.743.699.360	5.133.749.495.000	4.751.006.139.570

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2018.

**Ribu Rupiah*
***Jiwa*
****Juta Rupiah*

Faktor lainnya adalah PDRB. PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Hasil dari penggunaan berbagai faktor produksi berupa upah, bunga dan sewa. Semakin banyak masyarakat yang bekerja maka akan berpengaruh pada pendapatan. Semakin tinggi pendapatan masyarakat akan semakin tinggi juga permintaan

barang dan jasa. Hal ini akan mengakibatkan semakin besar kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pajak dan retribusi yang ditarik pemerintah daerah (Wahyuni, 2017; Adriani, 2008).

Faktor lain yang mempengaruhi PAD yaitu belanja daerah. Dikutip dari Wagner dalam Yulianita (2008) semakin meningkatnya belanja daerah maka semakin meningkatkan fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, fungsi kesejahteraan, fungsi perbankan dan fungsi pembangunan. Jika fasilitas yang disediakan pemerintah sudah memadai diimbangi dengan pendapatan masyarakat yang meningkat maka fasilitas tersebut dapat difungsikan sebagaimana mestinya sehingga pemerintah dapat mengenakan pajak atas fasilitas tersebut kepada masyarakat yang mana akan meningkatkan PAD.

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengindentifikasi dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk, PDRB dan belanja daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung tahun 2000-2017.
2. Besarnya pengaruh jumlah penduduk, PDRB dan belanja daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung tahun 2000-2017.

B. Landasan Teori

Pendapatan daerah berdasarkan Undang-undang No.17 tahun 2003 adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah (Bpk.go.id).

PAD berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2004 yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan yang dikelola dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan berdasarkan Undang-undang No.33 tahun 2004 terdiri dari Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. Berdasarkan Undang-undang RI No.32 Tahun 2004, lain-lain pendapatan yang sah.

Adapun pengertian faktor yang mempengaruhi PAD yaitu jumlah penduduk. Menurut Widjajanta, dkk (2009) teori jumlah penduduk dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu teori adam smith, Malthus, dan Karl Marx.

1. Teori Adam Smith
   Teori Adam Smith (1723-1790) memandang pembangungan ekonomi sebagai proses pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi dengan memanfaatkan mekanisme pasar. Suatu perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika mekanisme pasar berjalan dengan baik dan sempurna. Syarat yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan spesialisai yang dikontrol, melalui mekanisme pasar. Peranan pemerintah hanya mengupayakan agar mekanisme paasar berjalan dengan baik. Untuk itu, yang harus dilakukan pemerintah adalah pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, dan penyediaan barang publik, seperti pendidikan dan kesehatan.
2. Teori Malthus
   Thomas Robert Malthus (176-1834) menyoroti hubungan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk. Ekonomi hanya akan tumbuh dalam jangka panjang jika pertambahan penduduk lebih

rendah daru pertumbuhan ekonomi. Menurut Malthus, pertambahan penduduk berdasarkan deret ukur, sementara pertumbuhan pangan berdasarkan deret hitung yang akan menyebabkan pada masa datang cenderung mengalami kekurangan pangan.

3. Teori Karl Marx
   Karl Marx (1818-1883) memandang proses kemajuan ekonomi proses evolusi sosial. Menurutnya, faktor pendorong perkembangan ekonomi adalah kemajuan teknologi dengan begitu sangat berpengaruh besar dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang dimana tenaga mesin mengambil alih pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Dengan menggunakan mesin proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien, tidak membutuhkan banyak tenaga kerja serta memproduksi barang dalam jumlah besar. Hadirnya teknologi yang maju tidak memberikan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, melainkan hanya sebagian kecil saja yang dapat menikmatinya, maka dari itu struktur masyarakat harus diubah menjadi sistem sosialis dimana alat–alat produksi dimiliki bersama.

Selain itu faktor yang mempengaruhi PAD yaitu PDRB. Menurut Case and Fair (2007) Produk Domestik Bruto adalah adalah nilai pasar total output suatu negara. Produk Domestik Bruto merupakan nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi dalam suatu negara.

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Menurut Sumodiningrat dalam Tangkilisan (2005), PDRB dapat dibagi dalam tiga pendekatan, yaitu metode produksi (*production approach*), metode pendapatan (*income approach*) dan metode pengeluaran (*expenditure approach*). Unit-unit produksi dikelompokan dalam sembilan lapangan usaha (sektor) yaitu : \Pertanian, perternakan, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan, jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah)

Secara pendekatan pendapatan PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum di potong pajak penghasilan dan pajak langsung.

Secara pendekatan pengeluaran PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik, perubahan inventori, eskpor neto (merupakan ekspor dikurangi impor).

Selain itu ada belanja daerah. Menurut Undang-undang No,33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, belanja daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan. Sedangkan menurut peraturan pemerintah No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No.13 tahun 2006 tentang pedoman oengelolaan keuangan daerah, belanja daerah dikelompokan menjadi dua yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarakan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari, belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji Statistika

Tabel 2. Ringkasan Nilai t-statistik Model Pengaruh jumlah penduduk, PDRB dan belanja daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Variabel	t-Statistik	t-Tabel (α=5%)	Kesimpulan
JP	2.922507	2.14479	H_0 ditolak/berpengaruh signifikan
PDRB	3.177076	2.14479	H_0 ditolak/berpengaruh signifikan
BD	3.694733	2.14479	H_0 ditolak/berpengaruh signifikan

Sumber: model estimasi, diolah..

a. Uji t

Dari Tabel 2 hasil estimasi untuk variabel jumlah penduduk, PDRB dan belanja daerah maka di peroleh t-statistik > t-tabel maka H_0 ditolak yang berarti variabel jumlah penduduk, PDRB dan belanja daerah secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung pada tingkat 95%.

b. Uji F

Tabel 3. Ringkasan Nilai f-statistik Model pengaruh jumlah penduduk, PDRB dan belanja daerah**.**

Variabel	F-hitung	F-tabel	Hasil Uji
Jumlah Penduduk, PDRB dan Belanja Daerah	276.3771	3.29	F-hit > f-tabel

Sumber: Hasil data sekunder diolah E-views 7

Dengan menggunakan derajat kebebasan pembilang (k-1= 3-1= 2) dan derajat kebebasan penyebut (n-k = 18 - 3= 15), diperoleh hasil estimasi nilai F-statistik sebesar 276.3771 dan F-tabel sebesar 3.29. Setelah dibandingkan antara F-statistik dengan F-tabel di peroleh kesimpulan F-statistik > F tabel maka H0 ditolak. Artinya variabel indipenden (Jumlah Penduduk, PDRB, Belanja Daerah) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (PAD).

Uji Ekonometrika

a. Heteroskedastis

Dari Tabel 4. hasil uji heteroskedastis dengan menggunakan *uji white* memiliki kriteria bahwa nilai *Obs*R-square* lebih besar dari $\alpha = 0.05$ (0.4277>0.05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima yang berarti pada model regresi tidak terjadi penyimpangan asumsi heteroskedastis.

b. Autokorelasi

Dari Tabel 3. hasil perhitungan uji LM diperoleh nilai Obs*R-square sebesar 0.0207, $\alpha = 0.05$(0.0207>0.05).

Artinya dalam model estimasi tidak teradapat masalah autokorelasi.

c. Multikolinier

Dari Tabel 4. hasil dari pengujian diperoleh R2 lama. Artinya tidak terdapat masalah multikolinier antara variabel bebas dalam model estimasi.

d. Linearitas

Dari Tabel 4. dari hasil pengujian diperoleh F-statistik yang lebih besar dari tingkat α = 0,05 (0.995238> 0.05) yang berarti H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% model estimasi bersifat linear.

Tabel 4. Ringkasan Pengujian Asumsi Klasik

No	Jenis Pengujian	Alat Uji	Hasil
1	Heteroskedastis	Uji White : Obs*Rquare 0.4277, α = 0.05(0.4277> 0.05)	Tidak terjadi penyimpangan asumsi heteroskedastis
2	Autokorelasi	Uji LM : Obs*R-Square 0.0207, α = 0.05(0.0207> 0.05)	Tidak terdapat masalah autokorelasi
3	Multikolinier	R^2= 0.983395 R^2= PDRB_Belanja Daerah = 0.241125 R^2= Jumlah Penduduk_Belanja Daerah = 0.949756 R^2 Jumlah Penduduk_PDRB = 0.948564	Tidak terdapat masalah multikolinier antara variabel bebas dalam model estimasi
4	Linear	Uji Ramsey ; f-stat 0.995238 α = 0,05 (0.995238> 0.05)	Model estimasi bersifat linier
5	Normalitas	J-B Test : Prob. 0.619531, α = 0.05 (0.619531>0.05)	Model estimasi berdistribusi normal

Analisis Ekonomi

a. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PAD di Kabupaten Bandung

Gambar 1. Grafik Jumlah PAD dan Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung

Berdasarkan grafik diatas pada tahun 2015 jumlah penduduk cenderung stabil, namun *growth* PAD di Kabupaten Bandung mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan dikarenakan oleh kurangnya pengoptimalan kontribusi pajak reklame. Ada 400 titik reklame di Kabupaten Bandung yang masih ilegal. Hal ini dikarenakan banyaknya pajak reklame yang masuk pada Kota Bandung namun, pemasangan reklame ada di wilayah Kabupaten Bandung. Selain itu, banyaknya reklame yang tidak memiliki izin karena pemilik malas melakukan perizinannya dan mankir dari kewajibannya untuk membayar pajak reklame serta habisnya masa izin reklame (republika.co.id).

b. Pengaruh PDRB terhadap PAD di Kabupaten Bandung

Berdasarkan Gambar 2. pada tahun 2015-2016 PDRB naik dari 0,059% menjadi 0,063%, namun tidak diikuti *growth* PAD di Kabupaten Bandung, sebaliknya PAD di Kabupaten Bandung mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena kurang pengawasan dari pemerintah terkait tentang pajak industri. Dilasir dari Pikiran Rakyat (2017) jumlah pajak industri Kabupaten

Bandung kalah dengan Kota Bandung. Hal ini terjadi karena sebagian besar alamat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) industri berada di wilayah Kabupaten Bandung, sehingga pajak tersebut masuk ke Kota Bandung padahal lokasi industri berada di Kabupaten Bandung

Gambar 2. Grafik PDRB dan PAD Kabupaten Bandung

c. Pengaruh Belanja Daerah terhadap PAD di Kabupaten Bandung

Dari hasil estimasi model, untuk variabel belanja daerah diperoleh nilai $t_{statistik}$ sebesar 3.694733. Setelah dibandingkan antara $t_{statistik}$ dengan t_{tabel} dapat disimpulkan bahwa belanja daerah secara parsial berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Bandung. Adapun arah hubungannya dari nilai koefisien variabel belanja daerah adalah positif 0.693224. Ketika belanja daerah naik sebesar 1% *ceteris paribus* maka PAD di Kabupaten Bandung akan naik sebesar 0.69% (bersifat inelastis). Ketidakelastisan PAD terhadap belanja daerah di Kabupaten Bandung dikarenakan besarnya pengeluaran belanja tidak langsung terutama anggaran belanja pegawai yang menghabiskan sebesar 50,13% dari total pengeluaran pemerintah. Hal ini dikarenakan jumlah PNS yang melebihi kapasitas yang dibutuhkan. Banyaknya penerimaan PNS dikarenakan pemerintah Kabupaten Bandung masih membutuhkan tenaga kerja di pelosok daerah. Idealnya penerimaan PNS yaitu sebanyak 15.000 orang, faktanya jumlah PNS di Kabupaten Bandung sebanyak 21.300 orang (jabarexpres). Namun, banyaknya PNS tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dikarenakan ketidaksesuaian bidang keahliannya, sehingga dapat menurunkan produktivitas PNS. Selain itu, adanya gagalnya proses lelang sejumlah proyek pembangunan. Lelang yang meleset mengakibatkan proses pencairan/pengeluaran dana terhambat sehingga dapat mengurangi anggaran total belanja daerah.

Seharusnya Pengeluaran pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif, karena pengeluaran pemerintah atau anggaran belanja menjadi salah satu variabel penggerak pertumbuhan ekonomi. Temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian Halim (2001) yang menyatakan bahwa dalam penciptaan kemandirian daerah, maka pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki, dengan cara memberi proporsi belanja pembangunan yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor produktif di daerah agar dapat meningkatkan PAD. Temuan ini juga bertentangan dengan hasil penelitian Abimanyu (2005) Jika sarana dan prasarana yang dimiliki daerah memadai masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitas yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan PAD

D. Kesimpulan

1. Dari hasil estimasi teridentifikasi semua variabel independen(jumlah penduduk, PDRB dan belanja daerah secara parsial signifikan

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung. Adapun variabel independen yang berpengaruh namun inelastis yaitu jumlah penduduk dan belanja daerah. Sedangkan variabel independen yang berpengaruh dan elastis yaitu PDRB.

2. Besarnya pengaruh variabel jumlah penduduk, PDRB dan belanja daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung sebesar 98,33%, sementara sisanya besar pengaruh dari variabel lain yang tidak diangkat dalam penelitian ini. Jadi pengaruh jumlah penduduk dan PDRB sangat kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung, sedangkan belanja daerah kecil pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bandung yang disebabkan berbagai hal.

E. Saran

Bagi pemerintah Kabupaten Bandung, pengeluaran pemerintah diutama untuk kepentingan publik, utamanya dalam bentuk pembangunan sarana dan prasana. Selain itu pemerintah Kabupaten Bandung harus memiliki inovasi baru berbentuk digital. Sistem online dalam pajak dapat menjadi solusi dalam membayar pajak agar tidak ada lagi kebocoran untuk pajak.

Daftar Pustaka

Abimanyu. (2005). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empiris di Wilayah Provinsi Jawa Tengah & DIY. JAAI. Vol. 08, No. 2,pp 416-424.

Adriani, E., & Handayani, S. I. (2008). Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.8 No.2 Juli Tahun 2008.

Case, Karl E. Dan Ray. C. Fair 2007. Prinsip-prinsip Ekonomi Makro : Edisi Kelim. Jakarta : Erlangga. Departemen Pendidikan Nasional.

Halim, A. (2004). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Purnomo, B. (2009). Obligasi Daerah. Bandung: Alfabeta.

Simanjuntak, P. (2002). “Masalah Upah dan Jaminan sosial”, dalam Undang-Undang yang baru tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.

Tangkilisan, Hessel N. S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Grasindo.

Wahyuni, A. T. (2017). Pengaruh PDRB, Tingkat Inflasi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2006-2015).

Widjajanta, Bambang dkk. 2009. Mengasah Kemampuan Ekonomi. Jakarta : Pusat Perbukuan,

Yulianita, A. (2008). Analisis Sektor Unggulan dan Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jurnal Ekonomi Pembagunan Volume 7, No. 2 Hal: 70-85 Desember 2009